BARANG EKSTRAKOMTABEL DALAM LAPORAN KEUANGAN

Oleh
Yoga Aditya Pambudi
Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia
E-mail: piikwalik@gmail.com

Article History:

Received: 08-06-2022

Revised: 20-06-2022

Accepted: 12-07-2022

Keywords:

Barang Milik Negara (BMN),
Ekstrakomtabel, Laporan
Keuangan, Satuan Kerja.

Abstract: Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk keterbukaan instansi pemerintah dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Oleh karena itu setiap Instansi maupun Satuan Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan di lingkup instansinya. Laporan Keuangan ada yang bersifat semesteran maupun bersifat tahunan. Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan berbagai kaidah penyusunan laporan keuangan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana pencatatan dan pengungkapan barang ekstrakomptabel dalam laporan keuangan..

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47), Laporan Keuangan merupakan alat komunikasi yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan bentuk akhir dari transaksi-transaksi keuangan yang dijalankan pada suatu organisasi/instansi.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Dalam kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah. Tujuan laporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. International Federation of Accounting Public Sector Committee (IFAC PSC) mengeluarkan IFAC PSC Study 1 tentang Financial Reporting by National Governments (2000), yang menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah atau satuan

kerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan sumber daya yang digunakan, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam rangka pelaksanaan APBN setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan laporan keuangan pemerintah terdiri atas :

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi mengenai anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya.

ii. Neraca

Neraca memberikan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset lancar maupun asset tidak lancar, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dan ekuitas pada periode tertentu.

Neraca tingkat Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi dari neraca tingkat Kementerian/Lembaga. Dalam neraca tersebut mencakup semua asset dan kewajiban dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyediakan seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan/instansi. Selain melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Arus Kas

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas pada pemerintahan dapat memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode laporan. Laporan Arus Kas memberikan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi posisi kas pemerintah dalam rangka aktivitas operasi, investasi, pendanaan pemerintah. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini, Laporan Arus Kas ini disusun oleh unit pemerintah yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. Pada organisasi pemerintah pusat fungsi perbendaharaan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan di organisasi pemerintah daerah, fungsi perbendaharaan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode tertentu, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam laporan keuangan. Penyusunan CaLK bertujuan agar laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari berbagai macam jenis sumber artikel ilmiah yang relevan serta dari berbagai literature dari peraturan-peraturan yang ada mengenai penyusunan Laporan Keuangan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan dan perlakuan Barang Ekstrakomtabel dalam Laporan Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan

Bachtiar Arif dkk (2002) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sedangkan Standart Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)). Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat independen dengan mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disebutkan bahwa akuntansi dan laopran keuangan harus memenuhi 8 prinsip, yaitu:

1. Basis Akuntansi (Akrua);
2. Nilai Historis (Historical Cost);
3. Realisasi (Realization);
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form);
5. Periodisitas (Periodicity);
6. Konsistensi (Consistency);
7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure);
8. Penyajian Wajar (Fair Presentation);

Aset Tetap: Barang Intrakomtabel dan Barang Ekstrakomtabel

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa aset tetap memiliki kategori:

1. Merupakan Aset berwujud;
2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
3. Memiliki nilai manfaat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menyebutkan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi BMN adalah (1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin

atau aset tetap renovasi berupa peralatan dan mesin, serta (2) senilai sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk aset tetap berupa gedung dan bangunan serta aset tetap renovasi berupa gedung dan bangunan. Kapitalisasi BMN sendiri merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca.

Berdasarkan nilai kapitalisasi BMN dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) Barang Intrakomptabel; dan (2) Barang Ekstrakomptabel.

Barang Intrakomptabel adalah Barang Milik Negara yang berupa aset tetap yang nilai perolehannya di atas nilai kapitalisasi, Sedangkan barang ekstrakomptabel didefinisikan sebagai BMN berupa aset tetap yang memenuhi unsur aset tetap tetapi nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi.

KESIMPULAN

Kebijakan Pencatatan Barang Ekstrakomptabel dalam Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, setiap penerimaan maupun pengeluaran Negara harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN adalah berupa penyusunan laporan keuangan. Barang Intrakomptabel dalam laporan keuangan akan masuk pada pos neraca sebagai aset tetap, Berbeda dengan barang ekstrakomptabel, nilai yang dihasilkan atas perolehan barang tersebut tidak masuk di neraca. Oleh karena itu barang ekstrakomptabel harus disajikan secara lengkap dan memadai di Catatan Atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- [2] Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [3] Republik Indonesia, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- [4] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- [5] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005. PP No. 24 Tahun 2005 perihal Standar Akuntansi Pemerintah. Salemba Empat, Jakarta.
- [6] Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2021. Standart Akuntansi Pemerintah tahun 2021.